

**Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran
Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Periode 2006-2013**

*(Effect of Minimum Wage District/City,
Human Development Index (HDI) and Unemployment
on Poor Population in East Java Period 2006-2013)*

Ahmad Fathul Lutfi, Sunlip Wibisono, Lilis Yuliati
Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fathul_rf06@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat upah minimum kabupaten/kota, rasio perkembangan indeks pembangunan manusia serta pengangguran yang nantinya apakah berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013, akan tetapi indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

Kata kunci: Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Jumlah Penduduk Miskin.

Abstract

Economic development in Indonesia still faces the reality is that the extent of poverty, especially in rural areas. Poverty is closely related to the low incomes that can't meet the needs of life substantially. The purpose of this study was to determine the minimum wage level development districts / cities, the ratio of the development of the human development index and whether unemployment will affect poor population in the province of East Java in 2006-2013. Results of analysis showed that the minimum wage districts / cities and unemployment have a significant effect on poor population in the province of East Java in 2006-2013, but the human development index don't have a significant effect on poor population in East Java province in 2006- 2013.

Key words: Minimum Wage Districts / City, the Human Development Index, Unemployment, Poor Population.

Pendahuluan

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2004 dalam Masjkuri, 2007: 31).

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah

utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka persoalan pendapatan perkapita dari distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapat perhatian terutama untuk melihat tingkat pendapatan pembagian pendapatan di antara warga masyarakatnya yaitu siapa mendapat berapa dan siapa yang beruntung.

Pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang murah akan meningkatkan produktivitas penduduk dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk tersebut juga sejalan dengan

jumlah kemiskinan yang terjadi yang pada kenyataannya adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki penduduk miskin paling besar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Pada akhir 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 4.856.820 dengan presentase 12,73% dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 419428,45 milyar dan lebih tinggi dari periode tahun sebelumnya (BPS: 2013).

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian menggunakan *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam metode penelitian *explanatory* ini menjelaskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nasir, 1998: 45). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cakupan penelitian adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu 38 kabupaten/kota, dengan series 8 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2013 dengan jumlah keseluruhan 304 data panel yang merupakan penggabungan data *cross section* dan *time series*. Sumber data diperoleh berasal dari BPS.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dilakukan dengan cara menyalin data yang telah ada sebelumnya dengan cara mendatangi instansi terkait secara langsung ataupun secara tidak langsung (melalui internet, buku, jurnal dan lain sebagainya). Data yang diperoleh berasal dari dari BPS.

Metode Analisis Data

Pada umumnya, regresi data panel berbeda dengan regresi biasanya. Dalam regresi data panel terdapat tahapan penentuan model estimasi yang harus dilalui. Tahapan tersebut, antara lain; *pertama* penentuan analisis regresi data panel terdiri dari (1) *Fixed Effect Model* (FEM) dan (2) *Random Effect Model* (REM). Setelah dilakukan analisis regresi data panel, tahap *kedua* yang harus dilakukan adalah penentuan uji kesesuaian model dengan *Hausman test* atau uji Hausman. Tahap *ketiga* yaitu melakukan uji statistic diantaranya adalah uji parsial t (uji t), uji simultan F (uji F) dan uji R². Kemudian, tahap terakhir yaitu tahap ke *empat* yang dilakukan dalam metode analisis data adalah uji asumsi klasik (uji multikolinearitas), uji heteroskedastistik, uji auto korelasi dan uji normalitas).

a. Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data panel juga biasa disebut data terkelompok (*pooled data*), kombinasi berkala (kumpulan data berkala dan individual), data mikropanel, data bujur (*longitudinal data*) atau studi sekian waktu pada sekelompok objek penelitian, analisis riwayat peristiwa (*event history analysis*) atau studi sepanjang waktu dari sekumpulan objek sampai mencapai keberhasilan atau kondisi tertentu (Setiawan dan Dwi Endah, 2010 dalam Hasnuri, 2014: 9).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 38 kabupaten periode 2006-2013, dimana pada masing-masing

kabupaten runtun waktu tersebut terdapat tiga variabel bebas yaitu, UMK, IPM, dan pengangguran, maka jenis penelitian ini adalah panel data.

Adapun model data panel, persamaan dari data tersebut adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \mu_t; t=1,2,\dots,N$$

Sedangkan persamaan model data panel menggunakan *cross section* sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \mu_i; i=1,2,\dots,N$$

Maka model data panel ditulis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it} + \mu_{it}; i=1,2,\dots,N; t=1,2,\dots,T$$

Dimana :

T = Jumlah waktu

N = Jumlah observasi

NxT = Jumlah data panel

Dalam penelitian ini Kemiskinan merupakan fungsi dari UMK, IPM, dan Pengangguran. Maka dapat ditulis :

$$P M_{it} = f(UMK_{it} \cdot IPM_{it} \cdot Pgg_{it})$$

Dalam persamaan f diatas kemudian ditransformasikan ke model ekonometrika sebagai berikut :

$$P M_{it} = \beta_0 + \beta_1 UMK_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 Pgg_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

t = time series

β = Konstanta

ε = Error term

Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

1. Jumlah penduduk miskin adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Indonesia tahun 2006-2013. (dalam jiwa per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
2. Upah Minimum kabupaten/kota (X1) merupakan pendapatan rata-rata individu di setiap kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini diukur nominalnya tahun 2006-2013. (dalam rupiah per bulan). Sumber: Perpu Daerah.
3. Indeks Pembangunan Manusia (X2) merupakan tingkat kesejahteraan hidup yang diukur berdasarkan dengan standar *United Nations Development Programme* (UNDP). Dalam penelitian ini IPM diukur pada tahun 2006-2013. (dalam rasio per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
4. Pengangguran (X3) merupakan kendala yang dialami oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Povinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini pengangguran diukur pada

tahun 2006-2013. (dalam jiwa per tahun). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mengalami penurunan dari 7,678 juta jiwa pada tahun 2006 hingga menjadi 4,893 juta jiwa pada tahun 2013. Penurunan jumlah penduduk miskin ini tentu saja dapat terjadi dengan upaya-upaya pemerintah yang didorong melalui peningkatan upah minimum kecamatan, peningkatan pada indeks pembangunan manusia serta penekanan pada penanggulangan pengangguran.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan Upah minimum kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu 1 Januari.

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2006-2013 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terlihat pada tahun 2006 rata-rata upah minimum di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 520.595 menjadi Rp. 583.486 pada tahun 2007. Peningkatan rata-rata upah minimum di Provinsi Jawa Timur terjadi lagi pada tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2013 rata-rata upah minimum di Provinsi Jawa Timur menjadi Rp. 1.139.539.

Indeks pembangunan manusia merupakan ukuran kualitas hidup. Terdapat empat komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia, antara lain; angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran pemerintah. Berikut Tabel indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan dengan rasio rata-rata keseluruhan peningkatan dari 0,7 dari tahun 2006 ke tahun 2007 kemudian 0,1 pada tahun selanjutnya dan selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Peningkatan indeks pembangunan manusia ini tentu saja didorong dengan komponen yang ada di dalamnya, yaitu; angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil disesuaikan.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

Jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2006-2013 selalu mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat pada tahun 2006 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.574.800 jiwa menjadi 1.366.200 jiwa pada tahun 2007. Penurunan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur terjadi lagi pada tahun selanjutnya sehingga pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur menjadi 871.000 jiwa.

Hasil Analisis Data

a. Uji F

Berdasarkan hasil analisis Uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,00000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha=0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Penolakan terhadap hipotesis nol menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran (PGG) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

b. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel *independent* yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran (PGG) terhadap variabel *dependent* yaitu Jumlah penduduk miskin

Dari hasil pengujian analisis regresi berganda yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai probabilitas t_{hitung} variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak, berarti upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

2. Nilai Probabilitas t_{hitung} variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,0235 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak, berarti indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

3. Nilai probabilitas t_{hitung} variabel Pengangguran sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak, berarti pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

c. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi berganda dimaksudkan untuk mengetahui besarnya sumbangan dari variabel bebas (*independentvariables*) terhadap variabel terikat (*dependentvariables*). Nilai koefisien determinan terletak

antara 0 dan 1 apabila R^2 atau *R-square* mendekati 1 maka garis model tersebut memiliki sumbangan yang besar terhadap variabel terikat. Apabila R^2 atau *R-square* mendekati 0 maka model tersebut tidak mempunyai pengaruh yang besar atau tidak bias memberikan sumbangan terhadap perubahan variabel terikat.

Berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,959048 hal ini berarti 95,90% perubahan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran. Sedangkan 4,10% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

Pembahasan

Memerangi kemiskinan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi. Secara umum kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik. (Tjiptoherijanto, 1997:76). Menurut Lewis, A (dalam Suparlan, 1995:5), memandang kemiskinan dan cirri-cirinya sebagai suatu kebudayaan atau sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. (Suparlan, 1993:4-5)

Upah dan pengangguran memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana tinggi rendahnya upah akan mempengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada jumlah pengangguran. Upah merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang yaitu jumlah uang yaitu diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. (Sukirno dalam Yogatama, 2010).

Tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pemerintah memiliki peran sangat penting sebagai penyusun kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, 1993 dalam Suryati, 2015: 21).

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau kesejahteraannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. (Sukirno dalam Yogatama, 2010: 34), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi

kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien negatif sebesar 0,0000914 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki hubungan yang negatif. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan upah minimum kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013.

Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum yang disampaikan Kaufman (2000) dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

Akan tetapi pada kenyataannya upah minimum tidak berpengaruh negatif dan signifikan karena sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Indonesia adalah sektor pertanian, jasa dan diikuti oleh perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal. Pada sektor informal masih belum bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, padahal di Indonesia rata-rata pekerjaan orang Indonesia adalah sektor informal. Karena upah minimum berlaku di sektor formal, hubungan antara upah minimum dan kemiskinan berhubungan tidak signifikan wajar karena rata-rata penduduk di Indonesia adalah pekerja di sektor informal dan upah minimum tidak diberlakukan di sektor informal.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,008284 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur meskipun memiliki hubungan yang positif. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh negatif dan signifikan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013.

Hasil ini tidak sesuai dengan pendapat dari UNDP yang menyatakan bahwa dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan, angka harapan hidup, dan standar hidup layak akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yang akan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan penelitian

terdahulu karena adanya kontradiksi dengan upah minimum kabupaten/kota yang tidak mengikuti Peraturan Gubernur yang berlaku di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,641247 terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2006-2013.

Hasil ini sesuai dengan pendapat (Sukirno, 1994: 43) yang menyatakan bahwa Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mencari hubungan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Antara lain dengan menggunakan variabel upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upah minimum kabupaten/kota memperlihatkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum kabupaten/kota adalah signifikan yang berarti apabila setiap kali upah minimum kabupaten/kota mengalami penurunan maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks pembangunan manusia memperlihatkan pengaruh yang positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan maka jumlah penduduk miskin juga akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya kontradiksi dengan upah minimum kabupaten/kota yang tidak diberlakukan di sektor informal.
3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan atau positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali pengangguran mengalami peningkatan maka akan berdampak meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013.

4. Uji F Statistik menunjukkan bahwa analisis regresi pada tabel diperoleh hasil koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,959048, hal ini berarti 95,90% perubahan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh upah minimum kabupaten/kota, indeks pembangunan manusia dan pengangguran. Sedangkan 4,10% disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam persamaan regresi yang dibuat.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan hasil kesimpulan maka perlu ditindaklanjuti dengan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur harus lebih menerapkan upah minimum kabupaten/kota. Penerapan upah minimum kabupaten/kota akan mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan. Masyarakat yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pada akhirnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia melalui faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat, Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis dan cuma-cuma khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.
3. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar terjadi penurunan jumlah kemiskinan misalnya dengan mempermudah ijin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Sunlip Wibisono, M. Kes., Dr. Lilis Yuliati, SE., M. Si., dan Para staff Kantor Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Jumlah Penduduk Miskin*. <http://www.jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/182> (17 September)
- Masjkuri, Siti Umajah. 2007. *Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kumuh di Kota Surabaya*. Disertasi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga.

- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Republik Indonesia, No. 13. Tahun 2009 tentang. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Di perbanyak oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusriani. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi
- Suparlan, Parsudi. 1993. *Pengantar Metode Penelitian Suatu Pendekatan Kualitatif*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Yogatama, I Made. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing langsung di Indonesia (1990- 2009)*. Semarang, UNDIP.

